

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN UNTUK PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**ARUM MONICA PUTRI**

Perizinan adalah proses formal yang diperlukan untuk mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang sebelum melakukan suatu kegiatan atau usaha tertentu. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, serta untuk melindungi kepentingan publik, lingkungan, dan keselamatan. Polresta Bandar Lampung melalui Satuan Intelkam merupakan implementor dari kebijakan perizinan di kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan menganalisis faktor penghambat dari implementasi kebijakan perizinan di Polresta Bandar Lampung dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (1980), hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan perizinan untuk penertiban kegiatan masyarakat di Polresta Bandar Lampung belum optimal. Hanya aspek disposisi dan sumber daya yang menunjukkan hasil positif, sementara aspek komunikasi khususnya dalam transmisi informasi belum optimal dan fragmentasi dalam struktur birokrasi belum dilakukan. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan meliputi pemohon yang datang mendadak dengan membawa persyaratan yang tidak lengkap sehingga akan memakan waktu lebih untuk melengkapi dokumen persyaratan dan pembagian tugas yang belum jelas atau tidak resmi. Upaya pada aspek sosialisasi, transformasi, dan konsistensi standar pelayanan, serta penetapan delegasi tugas secara formal dan spesifik.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan, Kegiatan Masyarakat**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF PERMITTING POLICY FOR COMMUNITY ACTIVITY REGULATION AT POLRESTA BANDAR LAMPUNG**

**By**

**ARUM MONICA PUTRI**

*Permitting is a formal process required to obtain permission from the relevant authorities before carrying out a specific activity or business. This process aims to ensure that the activities to be conducted comply with established regulations and standards, as well as to protect public interests, the environment, and safety. Polresta Bandar Lampung, through the Intelligence Unit, is the implementer of the permitting policy in the city of Bandar Lampung. This study aims to analyze the implementation of the permitting policy for regulating community activities within the jurisdiction of Polresta Bandar Lampung and to examine the factors hindering the implementation of the permitting policy using a qualitative approach. Based on Edward III's (1980) policy implementation theory, the research findings indicate that the implementation of the permitting policy for community activity regulation at Polresta Bandar Lampung is not yet optimal. Only the aspects of disposition and resources show positive results, while the communication aspect, particularly in information transmission, has not been optimal, and fragmentation within the bureaucratic structure has not been addressed. Several hindering factors identified include applicants arriving unexpectedly with incomplete requirements, which prolongs the time needed to complete the necessary documents, as well as unclear or unofficial task assignments. Improvement efforts in socialization, transformation, and consistency of service standards, and the formal and specific delegation of tasks.*

**Keywords: Policy Implementation, Permitting, Community Activities**